

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TA. 2017



**Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Utara**

Jl. A.H Nasution No. 20 Telp. (061) 42771952 Fax. (061) 42771959 Medan
www.dispkp.sumutprov.go.id email : dinas_pkp@sumutprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan setelah melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan pada DPA Dinas PKP TA 2017. Perubahan Renja ini juga memuat usulan kegiatan – kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian target RPJMD yaitu pengurangan kawasan kumuh.

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan.

Medan,

2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. IDA MARIANA, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19601125 199203 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan alat untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu SKPD yang sangat strategis untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas PKP merupakan penerjemahan dari visi, misi serta program Rencana Kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra) sebagai landasan operasional untuk mencapai hasil maksimal sesuai dengan penetapan kinerja (tapkin) yang menjadi prioritas penanganan;
2. Rencana Kerja merupakan acuan Dinas PKP untuk menentukan program dan kegiatan pada Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta perencanaan program kegiatan sehingga menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018;
3. Rencana Kerja Dinas PKP merupakan instrumen dalam rangka untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Hal ini perlu dibuat untuk mengukur capaian kinerja yang telah diprogramkan dan dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman akan mempunyai dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena ada multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta penciptaan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat). Isu yang lain adalah pemenuhan rumah layak huni, cakupan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, serta penanganan permukiman kumuh. Sasaran umum pembangunan perumahan, pembangunan kawasan permukiman adalah meningkatkan akses untuk rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman,

terjangkau dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai, serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim. Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program, kegiatan yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar keluarga di Provinsi Sumatera Utara dapat menghuni rumah yang layak dan berkelanjutan.

Renja SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam mendukung pelaksanaan tugas Gubernur Sumatera Utara dengan tetap mengacu kepada RPJM Nasional dan Daerah sebagai landasan dan dokumen perencanaan nasional dan daerah secara menyeluruh berdasarkan kondisi daerah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan Renja dipertimbangkan faktor-faktor yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melalui SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewenangan dalam Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi Rumah Umum, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman dan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).

Pada tahun 2018 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2014-2018. Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara adalah :

- Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun,
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Tahapan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah melakukan penyesuaian kegiatan pada Renja 2017 dengan perkembangan pelaksanaan anggaran dan mengusulkan kegiatan baru dalam mendukung pencapaian target RPJMD. Tujuan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah untuk mewujudkan visi, misi dan program yang telah disusun oleh Gubernur Sumatera Utara dalam bidang perumahan dan Permukiman.

D. SISTIMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab – I : Pendahuluan

Dalam bab ini menyampaikan tentang latar belakang dan landasan normative, serta maksud dan tujuan.

Bab – II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II

Pada bab ini menyampaikan tentang pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renja SKPD, pelaksanaan Renja SKPD tahun ini dan capaian Renja SKPD.

Bab – III : Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja SKPD

Bab ini menyampaikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan 2017, serta program dan kegiatan dalam perubahan Renja Tahun Anggaran 2017

Bab – IV : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

A. PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENJA SKPD

Tahun Anggaran 2016 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengelola dana sebesar Rp. 125.591.063.323,- yang terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 39.324.968.000,- dan belanja Langsung sebesar Rp. 86.266.095.323,-.

Hasil yang telah dicapai pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2016 adalah :

1. Belanja Langsung yang telah dicapai adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kinerja sumber daya manusia dan aparatur pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman.
 - b. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan pekerjaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
2. Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk pembayaran gaji dan kelancaran pelaksanaan tugas staf Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya saluran drainase sepanjang 26.230 meter, adapun dengan terbangunnya saluran ini hasil yang dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya potensi daerah genangan pada kawasan perumahan / permukiman yang berada disepanjang jaringan drainase yang dibangun.
2. Terbangunnya jalan poros kawasan permukiman sepanjang 5.700 meter, adapun dengan terbangunnya jalan poros adalah meningkatkan aksesibilitas permukiman masyarakat.
3. Rehabilitasi dan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 349 unit.
4. Terselenggaranya koordinasi dan pembangunan pembangunan perumahan/permukiman serta peningkatan sumber daya manusia dalam bidang penataan ruang dan permukiman.
5. Terselenggarakannya pembangunan berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2016 dana yang telah terserap belanja langsung untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 75.203.235.693 (87,18 %) adapun realisasi kegiatan fisik sebesar 92,31%.

B. PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN INI DAN CAPAIAN RENJA SKPD

Pada penetapan APBD 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, alokasi anggaran Belanja Langsung untuk Dinas PKP adalah **Rp. 90.841.141.000,- (sembilan puluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)**, termasuk dengan anggaran yang di alokasikan untuk program kegiatan penunjang seperti program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan lain-lain.

Realisasi anggaran Belanja Langsung sampai dengan akhir triwulan I adalah Rp 0,- atau 0,0 %. Rencana penggunaan anggaran Belanja Langsung sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 adalah Rp 27.756.958.950,- atau 30,6 % dengan target fisik kegiatan sekitar 15 %. Realisasi anggaran Belanja Langsung sampai dengan akhir triwulan II adalah Rp 2.704.840.464 ,- atau 2,98 % dengan realisasi Fisik Kegiatan 8,61 %.

Rendahnya realisasi fisik dan keuangan dipengaruhi oleh baru terbentuknya pejabat pengelola kegiatan dan penanggung jawab keuangan serta belum tersedianya Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Penyusunan DED kegiatan Konstruksi sehingga telah menjadi dokumen lelang, Penyusunan TOR setiap kegiatan dan rapat – rapat penyusunan kegiatan tahun 2018.

Evaluasi hasil renja tahun 2017 sampai dengan triwulan II terlampir pada format I.G.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Perubahan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun Anggaran 2017 dengan penambahan pagu sebesar Rp **22.221.098.400,-** dilakukan untuk :

1. Melakukan penghapusan kegiatan yang tidak memungkinkan dilakukan pembangunan pada Tahun Anggaran 2017.
2. Pemenuhan kekurangan pagu kegiatan belanja keperluan operasional perkantoran.
3. Menambah pagu kegiatan untuk Upah Pekerja Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
4. Menambah kegiatan penyusunan DED untuk kegiatan konstruksi tahun 2018
5. Menambah kegiatan prioritas dalam mendukung capaian target kinerja pembangunan nasional dan prioritas daerah provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas PKP tahun 2017 terlampir dalam format I.H

BAB IV

PENUTUP

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan 2017 yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah yang bersifat langsung berdampak kepada masyarakat. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten/kota dan stakeholder - stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Utara.

FORMAT I.G
EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

Nama SKPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

No.	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Prov. Tahun 2014 s/d 2018 (Rp)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan s/d Tahun 2016 (Rp)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (Rp)		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017		Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2017	
								Realisasi Kinerja Renja (Rp)	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Kinerja Renja (Rp)	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Langsung											
I	1.05.1.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	10,551,000,000	1,036,650,413	12 bln	1,902,125,000	576,480,561	30.31	2,938,775,413	27.85
1	01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terkirimnya surat - surat dinas/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	-	30,649,000	1 thn	19,680,000	6,785,150	34.48	50,329,000	
2	01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air bersih dan listrik/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	-	317,059,079	1 thn	840,000,000	281,734,235	33.54	1,157,059,079	
3	01 . 04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedia alat dan bahan kebersihan/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	-	41,060,073	1 thn	60,000,000	24,992,000	41.65	101,060,073	
4	01 . 05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan di UPT/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	-	22,500,000	1 thn	37,300,000	15,543,200	41.67	59,800,000	
5	01 . 06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	-	45,376,800	1 thn	72,149,000	27,741,500	38.45	117,525,800	
6	01 . 07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat elektronik listrik dan elektronik/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	-	23,638,740	1 thn	33,696,000	14,044,950	41.68	57,334,740	
7	01 . 08	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar atau majalah/Meningkatnya kualitas aparatur	-	-	1 thn	24,000,000	11,970,000	49.88	-	
8	01 . 09	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan kegiatan/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	-	91,547,000	1 thn	172,664,000	47,335,000	27.41	264,211,000	
9	01 . 10	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan dinas keluar daerah/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	-	106,194,200	1 thn	410,556,000	42,723,096	10.41	516,750,200	
10	01 . 11	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	-	358,625,521	1 thn	232,080,000	103,611,430	44.64	590,705,521	
II	1.05.1.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya perlengkapan operasional kantor	21,420,000,000	992,082,470	12 bln	4,229,960,000	746,530,683	17.65	5,222,042,470	24.38
1	02 . 01	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Penambahan perlengkapan operasional kerja/Terpenuhinya perlengkapan operasional kantor	-	-	1 thn	141,400,000	-	-	-	

Belanja Langsung											
2	02 . 02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Penambahan peralatan dan perlengkapan kerja/Terpenuhinya perlengkapan kantor	-	-	1 thn	1,513,800,000	-	-	-	
3	02 . 03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan operasional gedung kantor/Tersedianya gedung kantor	-	680,572,000	1 thn	1,951,800,000	613,009,000	613,009,000.00	2,632,372,000	
4	02 . 04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan dan dan operasional kendaraan dinas/Kendaraan dinas beroperasi dengan baik	-	227,055,370	1 thn	322,960,000	110,047,583	110,047,583.00	550,015,370	
5	02 . 05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan operasional perlengkapan kantor/Terpenuhinya perlengkapan kantor	-	84,455,100	1 thn	300,000,000	23,474,100	23,474,100.00	384,455,100	
III	1.05.1.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	998,000,000	185,000,000	12 bln	585,000,000	-	-	770,000,000	77.15
1	03 . 01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/Disiplin pakaian aparatur	-	185,000,000	1 thn	585,000,000	-	-	770,000,000	
IV	1.05.1.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SDM pegawai lebih meningkat	1,210,000,000	248,157,600	12 bln	285,000,000	2,640,000	0.93	533,157,600	44.06
1	05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan/SDM pegawai lebih meningkat	-	248,157,600	1 thn	285,000,000	2,640,000	0.93	533,157,600	
V	1.05.1.05.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas laporan	1,666,000,000	618,986,300	12 bln	733,070,000	110,248,750	15.04	1,352,056,300	81.16
1	06 . 01	Penyusunan Laporan Neraca Dan Sistim Pembukuan	Dokumen laporan neraca/Laporan disampaikan tepat waktu	-	83,820,000	1 lap	123,800,000	-	-	207,620,000	
2	06 . 02	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Asset Dan Neraca Pada SKPD	Dokumen laporan asset/Meningkatnya kualitas laporan	-	77,323,000	1 thn	132,000,000	37,400,000	28.33	209,323,000	
3	06 . 03	Pengembangan Pengelolaan Informasi SKPD dan Operasional PPID	Laporan informasi publik/Meningkatnya kualitas laporan	-	69,546,600	1 lap	177,170,000	29,700,000	16.76	246,716,600	
4	06 . 04	Penyusunan LK Dan PK 2017	Dokumen laporan LK dan PK/Meningkatnya kualitas laporan	-	68,542,000	1 lap	55,600,000	1,400,000	2.52	124,142,000	
5	06 . 05	Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Distarukimsu Tahun 2017	Laporan progres pelaksanaan kegiatan/Meningkatnya kualitas laporan	-	187,597,000	1 thn	159,500,000	-	-	347,097,000	
6	06 . 06	Penyusunan Program Dan Kegiatan TA 2018	Dokumen rencana kerja tahunan/meningkatnya kualitas laporan	-	42,700,000	1 thn	85,000,000	41,748,750	49.12	127,700,000	
				-	89,457,700	1 thn				89,457,700	
VI	1.05.1.05.01.22.	Terwujudnya infrastur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan	332,013,000,000	88,425,206,504					88,425,206,504	26.63
VI	1.05.1.05.01.23.	Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur penataan lingkungan permukiman	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	231,644,000,000	72,687,031,451	200 ha	60,142,200,000	379,706,950	0.63	132,829,231,451	57.34
1	23 . 01	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Relokasi Korban Bencana Provinsi Erupsi Gunung Sinabung di Kawasan Merek	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	542,274,500	2 ha	2,000,000,000	6,680,000	0.33	2,542,274,500	

Belanja Langsung											
2	23 . 02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Batu Bara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	0,60 ha	600,000,000	4,840,000	0.81	-	
3	23 . 03	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Samosir	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	572,572,000	1 ha	1,000,000,000	4,990,000	0.50	1,572,572,000	
4	23 . 04	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	937,819,000	0,60 ha	600,000,000	4,990,000	0.83	1,537,819,000	
5	23 . 05	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Humbang Hasundutan	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	652,070,300	3,10 ha	3,100,000,000	7,320,000	0.24	3,752,070,300	
6	23 . 06	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Tengah	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	319,579,900	0,50 ha	500,000,000	-	-	819,579,900	
7	23 . 07	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Tanjung Balai	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	678,975,700	0,60 ha	600,000,000	4,740,000	0.79	1,278,975,700	
8	23 . 08	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Padang sidempuan	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	157,217,000	0,60 ha	600,000,000	3,850,000	0.64	757,217,000	
9	23 . 09	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Perbatasan Dairi Pakpak Barat	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	491,986,100	0,50 ha	500,000,000	4,480,000	0.90	991,986,100	
10	23 . 10	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Medan	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	417,678,000	1,65 ha	1,650,000,000	1,810,000	0.11	2,067,678,000	
11	23 . 11	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Barat	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	420,285,000	1 ha	1,000,000,000	-	-	1,420,285,000	
12	23 . 12	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Selatan	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	455,769,900	1,50 ha	1,500,000,000	-	-	1,955,769,900	
13	23 . 13	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Deli Serdang	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	416,316,500	1,20 ha	1,200,000,000	1,600,000	0.13	1,616,316,500	
14	23 . 14	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Labuhan Batu	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	472,715,500	0,50 ha	500,000,000	4,740,000	0.95	972,715,500	
15	23 . 15	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	306,744,200	0,75 ha	750,000,000	-	-	1,056,744,200	
16	23 . 16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Binjai	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	347,276,160	0,45 ha	450,000,000	2,160,000	0.48	797,276,160	
17	23 . 17	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Karo	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	420,563,400	1,75 ha	1,750,000,000	7,180,000	0.41	2,170,563,400	
18	23 . 18	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Simalungun	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	515,123,000	1,50 ha	3,000,000,000	6,840,000	0.23	3,515,123,000	
19	23 . 20	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Serdang Bedagai	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	142,531,000	1 ha	1,000,000,000	3,190,000	0.32	1,142,531,000	
20	23 . 21	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Langkat	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	725,503,000	1 ha	1,000,000,000	3,190,000	0.32	1,725,503,000	
21	23 . 22	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Tebing Tinggi	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	551,405,100	0,75 ha	750,000,000	3,730,000	0.50	1,301,405,100	

Belanja Langsung											
22	23 . 23	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Pematang Siantar	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	493,454,800	1 ha	1,000,000,000	4,725,000	0.47	1,493,454,800	
23	23 . 24	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Mandailing Natal	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	848,996,000	2 ha	2,000,000,000	7,070,000	0.35	2,848,996,000	
24	23 . 25	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Padang Lawas Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	643,609,200	1 ha	1,000,000,000	3,850,000	0.39	1,643,609,200	
25	23 . 26	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Labuhan Batu Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	475,579,600	0,50 ha	500,000,000	4,740,000	0.95	975,579,600	
26	23 . 28	Pembangunan PSU Permukiman PNS/ MBR Kab. Nias	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	513,679,600	0,50 ha	500,000,000	-	-	1,013,679,600	
27	23 . 29	Pembangunan PSU Permukiman Kab. Padang Lawas	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	439,636,400	0,50 ha	500,000,000	-	-	939,636,400	
28	23 . 30	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Deli Serdang	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	638,169,000	4,10 ha	8,100,000,000	4,800,000	0.06	8,738,169,000	
29	23 . 31	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Serdang Bedagai	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	4,80 ha	3,000,000,000	-	-	-	
30	23 . 32	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Langkat	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	831,000,000	2,10 ha	2,100,000,000	6,400,000	0.30	2,931,000,000	
31	23 . 33	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kota Tanjung Balai	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1,50 ha	1,500,000,000	6,860,000	0.46	-	
32	23 . 34	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1,50 ha	1,500,000,000	6,860,000	0.46	-	
33	23 . 35	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu Selatan	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1 ha	1,000,000,000	4,735,000	0.47	-	
34	23 . 36	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1,50 ha	1,500,000,000	6,860,000	0.46	-	
35	23 . 38	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Asahan	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1 ha	1,000,000,000	4,785,000	0.48	-	
36	23 . 39	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Batu Bara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1 ha	1,000,000,000	4,785,000	0.48	-	
37	23 . 40	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Simalungun	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	0,75 ha	750,000,000	6,930,000	0.92	-	
38	23 . 41	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kota Binjai	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1 ha	1,000,000,000	-	-	-	
39	23 . 42	Koordinasi dan Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	100%	265,500,000	110,317,050	41.55	-	
40	23 . 43	Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	100%	324,100,000	55,768,100	17.21	-	
41	23 . 44	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	100%	265,500,000	47,810,900	18.01	-	

Belanja Langsung											
42	23 . 45	Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	100%	287,100,000	11,210,900	3.90	-	-
43	23 . 46	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Lintas Pematang Siantar - Simalungun	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1 ha	1,000,000,000	-	-	-	-
44	23 . 47	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Mandailing Natal	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1 ha	1,000,000,000	-	-	-	-
45	23 . 48	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Toba Samosir	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1 ha	1,000,000,000	4,870,000	0.49	-	-
46	23 . 49	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Pakpak Bharat	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1 ha	1,000,000,000	-	-	-	-
47	23 . 50	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Padang Lawas	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1 ha	1,000,000,000	-	-	-	-
48	23 . 51	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Gunung Sitoli	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1 ha	1,000,000,000	-	-	-	-
49	23 . 52	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Tengah	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	1 ha	1,000,000,000	-	-	-	-
VIII											
	1.05.1.05.01.24.	Program pembinaan dan pengembangan perumahan dan permukiman	Publikasi pembangunan Sumatera Utara	191,030,000,000	58,360,532,829	1500 unit	22,963,786,000	889,233,520	3.87	81,324,318,829	42.57
1	24 . 01	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair Tahun 2017	Laporan partisipasi keikutsertaan dalam pameran/ Publikasi pembangunan sumatera utara	-	221,101,407	1 lap	341,112,300	296,112,300	86.81	562,213,707	-
2	24 . 02	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta dan Pameran Lingkungan Hidup Sumatera Utara di Medan Tahun 2017	Laporan partisipasi keikutsertaan dalam pameran/ Publikasi pembangunan sumatera utara	-	212,066,030	1 lap	325,480,000	144,468,400	44.39	537,546,030	-
3	24 . 03	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Inovasi Sumut 2017 dan Investment, Trade and Tourism of North Sumatera (ITT of North Sumatera) 2017	Laporan partisipasi keikutsertaan dalam pameran/ Publikasi pembangunan sumatera utara	-	197,507,027	1 lap	170,750,000	161,750,000	94.73	368,257,027	-
4	24 . 04	Penyuluhan bagi Masyarakat dalam rangka pemanfaatan budaya tinggal di Rumah Susun di Provsu	Laporan penyuluhan/Peningkatan rumah layak huni	-	547,000,000	1 lap	257,200,000	-	-	804,200,000	-
5	24 . 05	Pilot proyek pembangunan infrastruktur permukiman perdesaan di Desa Binaan PKK Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan sarana dan prasaran lingkungan permukiman/Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	-	479,900,000	1 pkt	732,350,200	27,750,200	3.79	1,212,250,200	-
6	24 . 06	Workshop dan Sosialisasi Peringatan Hari habitat sedunia di provinsi sumatera utara	Pembangunan sarana dan prasaran lingkungan permukiman/Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	-	9,516,098,700	1 pkt	490,800,000	-	-	10,006,898,700	-
7	24 . 07	Koordinasi Pembangunan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman di Provsu	Laporan kinerja bidang perumahan dan permukiman/tersedianya data kinerja dan capaian SPM Perumahan	-	-	1 lap	229,085,000	61,370,920	26.79	-	-
8	24 . 08	Monitoring SPM Bidang Perumahan di Provsu	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/Berkurangnya luas kawasan kumuh	-	40,750,000	100%	131,685,000	52,383,800	39.78	172,435,000	-

Belanja Langsung											
9	24 . 10	Sosialisasi Perancangan Kebijakan Penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas Kab/Kota di Sumatera Utara	Laporan sosialisasi/Peningkatan rumah layak huni	-	155,985,800	1 lap	192,750,000	-	-	348,735,800	
10	24 . 11	Realisasi Kesepakatan Penyediaan Kasiba dan Lisiba Litas Kab/Kota melalui penandatanganan MOU dan PKS antar Pemerintah Prov dan Kab/kota dan Unsur terkait bidang Perumahan	Perencanaan pembangunan perumahan/Peningkatan rumah layak huni	-	-	1 lap	188,000,000	2,420,000	1.29	-	
11	24 . 12	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni diluar kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	Rumah yang dibangun atau direhabilitasi/Peningkatan rumah layak huni	-	163,013,100	255 unit	7,500,000,000	26,545,000	0.35	7,663,013,100	
12	24 . 13	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka dukungan Hari Keluarga Nasional	Rumah yang dibangun atau direhabilitasi/Peningkatan rumah layak huni	-	-	34 unit	989,200,000	-	-	-	
13	24 . 15	Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan Kws.Permukiman (POKJA PKP)	Perencanaan pembangunan perumahan sumatera utara/Peningkatan rumah layak huni	-	-	1 lap	195,314,000	-	-	-	
14	24 . 16	Penyediaan Informasi Perumahan dan Kws. Permukiman (Penyediaan Rumah MBR, KPR, sistem Pembiayaan, Perbankan, Asosiasi Pengembang Perumahan, dll)	Bahan publikasi perumahan dan permukiman/Tersedianya bahan publikasi	-	-	1 set	220,059,500	50,649,500	23.02	-	
15	24 . 17	Identifikasi dan pemutakhiran data perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Utara	Buku laporan/Tersedianya data dan acuan pelayanan perumahan dan permukiman sumatera utara	-	-	1 buku	500,000,000	17,010,000	3.40	-	
16	24 . 18	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Provsu	Profil kawasan permukiman/Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	3 kws	1,500,000,000	12,920,000	0.86	-	
17	24 . 19	Pembangunan Rumah Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung	Pembangunan rumah layak huni/Rumah relokasi pengungsi	-	-	48 unit	3,000,000,000	20,818,400	0.69	-	
18	24 . 20	Penyusunan Profil Kawasan Kumuh di PKW Provinsi	Profil kawasan kumuh permukiman/Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	-	-	5 kws	2,500,000,000	2,000,000	0.08	-	
19	24 . 21	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni di kepulauan nias Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan rumah layak huni/Terehabitasinya Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di Sumatera Utara	-	-	90 unit	3,500,000,000	13,035,000	0.37	-	

Belanja Langsung										
1.05.1.05.01.25.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BANGUNAN GEDUNG	NSPM Bangunan Gedung	32,375,000,000	9,207,449,040						
1.05.1.05.01.26.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH	Regulasi daerah terhadap pengendalian ruang	45,118,000,000	15,209,803,375						
1.05.1.05.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	RTR kawasan strategis Provsu	6,715,000,000	2,193,175,350						
1.05.1.05.01.28.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Luas RTH perkotaan	22,448,000,000	2,435,164,100						

MEDAN, 2017
 KEPALA DINAS
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. IDA MARIANA
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19601125 199203 2 001

FORMAT I.H
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2017

Nama SKPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

NO		URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKAOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)		RENCANA TAHUN 2017 (Tahun Berjalan)											
					KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Belanja Langsung												90,841,141,000	113,180,855,400	23,256,741,400		
I	1.05.1.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		Aparatur		Sumatera Utara		12 bln		1,902,125,000	1,856,165,000	(45,960,000)	APBD	P-APBD	
1	01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terkirimnya surat - surat dinas/Meningkatny a pelayanan administrasi perkantoran	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	19,680,000	19,680,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan	
2	01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air bersih dan listrik/Meningkatny a pelayanan administrasi perkantoran	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	840,000,000	758,400,000	(81,600,000)	APBD	P-APBD	
3	01 . 04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedia alat dan bahan kebersihan/Mening katnya pelayanan administrasi perkantoran kantor	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	60,000,000	60,000,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan	
4	01 . 05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan di UPT/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	37,300,000	60,000,000	22,700,000	APBD	P-APBD	
5	01 . 06	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak/Meningkatny a pelayanan administrasi perkantoran	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	72,149,000	84,039,000	11,890,000	APBD	Tidak ada perubahan	
6	01 . 07	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat elektronik listrik dan elektronik/Meningk atnya pelayanan administrasi perkantoran	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	33,696,000	33,696,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan	
7	01 . 08	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya surat kabar atau majalah/Meningkat nya kualitas aparatur	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	24,000,000	36,000,000	12,000,000	APBD	P-APBD	

8	01 . 09	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan kegiatan/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	172,664,000	161,714,000	(10,950,000)	APBD	Tidak ada perubahan
9	01 . 10	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan dinas keluar daerah/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	410,556,000	410,556,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
10	01 . 11	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah/Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	232,080,000	232,080,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
II	1.05.1.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya perlengkapan operasional kantor		Aparatur		Sumatera Utara		12 bln		4,229,960,000	5,369,171,000	1,139,211,000	APBD	P-APBD
1	02 . 01	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Penambahan perlengkapan operasional kerja/Terpenuhiya perlengkapan operasional kantor	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	141,400,000	141,400,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
2	02 . 02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Penambahan peralatan dan perlengkapan kerja/Terpenuhiya perlengkapan kantor	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	1,513,800,000	2,025,511,000	511,711,000	APBD	P-APBD
3	02 . 03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan operasional gedung kantor/Tersedianya gedung kantor	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	1,951,800,000	2,357,800,000	406,000,000	APBD	P-APBD
4	02 . 04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan dan dan operasional kendaraan dinas/Kendaraan dinas beroperasi dengan baik	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	322,960,000	328,960,000	6,000,000	APBD	P-APBD
5	02 . 05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan operasional perlengkapan kantor/Terpenuhiya perlengkapan kantor	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	300,000,000	515,500,000	215,500,000	APBD	P-APBD
III	1.05.1.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		Aparatur		Sumatera Utara		12 bln		585,000,000	585,000,000	-	APBD	
1	03 . 01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/Disiplin pakaian aparatur	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	585,000,000	585,000,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
IV	1.05.1.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SDM pegawai lebih meningkat		Aparatur		Sumatera Utara		12 bln		285,000,000	473,500,000	188,500,000	APBD	P-APBD

1	05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersosialisasikan ya peraturan perundang-undangan/SDM pegawai lebih meningkat	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	285,000,000	473,500,000	188,500,000	APBD	P-APBD
V	1.05.1.05.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas laporan		Aparatur		Sumatera Utara		12 bln		733,070,000	715,484,000	(17,586,000)	APBD	
1	06 . 01	Penyusunan Laporan Neraca Dan Sistik Pembukuan	Dokumen laporan neraca/Laporan disampaikan tepat waktu	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 lap	Tidak ada perubahan	123,800,000	60,400,000	(63,400,000)	APBD	Tidak ada perubahan
2	06 . 02	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Asset Dan Neraca Pada SKPD	Dokumen laporan asset/Meningkatnya kualitas laporan	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	132,000,000	129,600,000	(2,400,000)	APBD	Tidak ada perubahan
3	06 . 03	Pengembangan Pengelolaan Informasi SKPD dan Operasional PPID	Laporan informasi publik/Meningkatnya kualitas laporan	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 lap	Tidak ada perubahan	177,170,000	177,170,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
4	06 . 04	Penyusunan LK Dan PK 2017	Dokumen laporan LK dan PK/Meningkatnya kualitas laporan	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 lap	Tidak ada perubahan	55,600,000	55,600,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
5	06 . 05	Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Distarukimsu Tahun 2017	Laporan progres pelaksanaan kegiatan/Meningkatnya kualitas laporan	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	159,500,000	207,714,000	48,214,000	APBD	P-APBD
6	06 . 06	Penyusunan Program Dan Kegiatan TA 2018	Dokumen rencana kerja tahunan/meningkatnya kualitas laporan	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 thn	Tidak ada perubahan	85,000,000	85,000,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
VI	1.05.1.05.01.23.	Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur penataan lingkungan permukiman	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		Masyarakat				200 ha		60,142,200,000	80,531,744,400	21,306,571,400		
1	23 . 01	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Relokasi Korban Bencana Provinsi Erupsi Gunung Sinabung di Kawasan Merek	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Karo	Tidak ada perubahan	2 ha	Tidak ada perubahan	2,000,000,000	66,500,000	(1,933,500,000)	APBD	P-APBD
2	23 . 02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Batu Bara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Batu Bara	Tidak ada perubahan	0,60 ha	Tidak ada perubahan	600,000,000	608,592,000	8,592,000	APBD	P-APBD
3	23 . 03	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Samosir	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Samosir	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	1,068,646,000	68,646,000	APBD	P-APBD
4	23 . 04	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Tapanuli Utara	Tidak ada perubahan	0,60 ha	Tidak ada perubahan	600,000,000	724,273,000	124,273,000	APBD	P-APBD

5	23 . 05	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Humbang Hasundutan	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Humbang Hasudutan	Tidak ada perubahan	3,10 ha	Tidak ada perubahan	3,100,000,000	3,151,750,000	51,750,000	APBD	P-APBD
6	23 . 06	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Tengah	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Tapanuli Tengah	Tidak ada perubahan	0,50 ha	Tidak ada perubahan	500,000,000	463,743,000	(36,257,000)	APBD	P-APBD
7	23 . 07	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Tanjung Balai	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kota Tanjung Balai	Tidak ada perubahan	0,60 ha	Tidak ada perubahan	600,000,000	572,411,000	(27,589,000)	APBD	P-APBD
8	23 . 08	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Padang sidempuan	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kota Padang Sidempuan	Tidak ada perubahan	0,60 ha	Tidak ada perubahan	600,000,000	565,359,000	(34,641,000)	APBD	P-APBD
9	23 . 09	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Perbatasan Dairi Pakpak Barat	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Dairi-Kab. Pakpak Barat	Tidak ada perubahan	0,50 ha	Tidak ada perubahan	500,000,000	479,743,000	(20,257,000)	APBD	P-APBD
10	23 . 10	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Medan	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kota Medan	Tidak ada perubahan	1,65 ha	Tidak ada perubahan	1,650,000,000	1,725,832,000	75,832,000	APBD	P-APBD
11	23 . 11	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Barat	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Nias Barat	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	954,990,400	(45,009,600)	APBD	P-APBD
12	23 . 12	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Selatan	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Nias Selatan	Tidak ada perubahan	1,50 ha	Tidak ada perubahan	1,500,000,000	1,421,061,000	(78,939,000)	APBD	P-APBD
13	23 . 13	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Deli Serdang	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Deli Serdang	Tidak ada perubahan	1,20 ha	Tidak ada perubahan	1,200,000,000	1,207,440,000	7,440,000	APBD	P-APBD
14	23 . 14	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Labuhan Batu	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Labuhan Batu	Tidak ada perubahan	0,50 ha	Tidak ada perubahan	500,000,000	506,520,000	6,520,000	APBD	P-APBD
15	23 . 15	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Utara	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Nias Utara	Tidak ada perubahan	0,75 ha	Tidak ada perubahan	750,000,000	679,063,000	(70,937,000)	APBD	P-APBD
16	23 . 16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Binjai	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kota Binjai	Tidak ada perubahan	0,45 ha	Tidak ada perubahan	450,000,000	410,200,000	(39,800,000)	APBD	P-APBD
17	23 . 17	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Karo	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Karo	Tidak ada perubahan	1,75 ha	Tidak ada perubahan	1,750,000,000	1,640,763,000	(109,237,000)	APBD	P-APBD
18	23 . 18	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Simalungun	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Simalungun	Tidak ada perubahan	1,50 ha	Tidak ada perubahan	3,000,000,000	2,760,685,000	(239,315,000)	APBD	P-APBD

19	23 . 20	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Serdang Bedagai	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Serdang Bedagai	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	1,016,880,000	16,880,000	APBD	P-APBD
20	23 . 21	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Langkat	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Langkat	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	1,007,440,000	7,440,000	APBD	P-APBD
21	23 . 22	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Tebing Tinggi	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kota Tebing Tinggi	Tidak ada perubahan	0,75 ha	Tidak ada perubahan	750,000,000	701,952,000	(48,048,000)	APBD	P-APBD
22	23 . 23	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Pematang Siantar	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kota Pematang Siantar	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	948,904,000	(51,096,000)	APBD	P-APBD
23	23 . 24	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Mandailing Natal	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Mandailing Natal	Tidak ada perubahan	2 ha	Tidak ada perubahan	2,000,000,000	1,866,378,000	(133,622,000)	APBD	P-APBD
24	23 . 25	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Padang Lawas Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Padang Lawas Utara	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	937,638,000	(62,362,000)	APBD	P-APBD
25	23 . 26	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Labuhan Batu Utara	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Labuhan Batu Utara	Tidak ada perubahan	0,50 ha	Tidak ada perubahan	500,000,000	496,996,000	(3,004,000)	APBD	P-APBD
26	23 . 28	Pembangunan PSU Permukiman PNS/ MBR Kab. Nias	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Nias	Tidak ada perubahan	0,50 ha	Tidak ada perubahan	500,000,000	478,579,000	(21,421,000)	APBD	P-APBD
27	23 . 29	Pembangunan PSU Permukiman Kab. Padang Lawas	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Padang Lawas Utara	Tidak ada perubahan	0,50 ha	Tidak ada perubahan	500,000,000	487,801,000	(12,199,000)	APBD	P-APBD
28	23 . 30	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Deli Serdang	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Deli Serdang	Tidak ada perubahan	4,10 ha	Tidak ada perubahan	8,100,000,000	8,361,783,000	15,840,000	APBD	P-APBD
29	23 . 31	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Serdang Bedagai	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Serdang Bedagai	Tidak ada perubahan	4,80 ha	Tidak ada perubahan	3,000,000,000	2,803,870,000	820,000	APBD	P-APBD
30	23 . 32	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Langkat	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Langkat	Tidak ada perubahan	2,10 ha	Tidak ada perubahan	2,100,000,000	1,153,700,000	19,720,000	APBD	P-APBD
31	23 . 33	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kota Tanjung Balai	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kota Tanjung Balai	Tidak ada perubahan	1,50 ha	Tidak ada perubahan	1,500,000,000	1,447,689,000	(52,311,000)	APBD	P-APBD
32	23 . 34	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Labuhan Batu	Tidak ada perubahan	1,50 ha	Tidak ada perubahan	1,500,000,000	1,446,819,000	(53,181,000)	APBD	P-APBD

33	23 . 35	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu Selatan	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	936,276,000	(63,724,000)	APBD	P-APBD
34	23 . 36	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu Utara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Labuhan Batu Utara	Tidak ada perubahan	1,50 ha	Tidak ada perubahan	1,500,000,000	1,481,092,000	(18,908,000)	APBD	P-APBD
35	23 . 38	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Asahan	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Asahan	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	850,000,000	(150,000,000)	APBD	P-APBD
36	23 . 39	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Batu Bara	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Batu Bara	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	1,374,348,000	374,348,000	APBD	P-APBD
37	23 . 40	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Simalungun	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Simalungun	Tidak ada perubahan	0,75 ha	Tidak ada perubahan	750,000,000	746,300,000	(3,700,000)	APBD	P-APBD
38	23 . 41	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kota Binjai	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Kota Binjai	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	930,496,000	(69,504,000)	APBD	P-APBD
39	23 . 42	Koordinasi dan Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	100%	Tidak ada perubahan	265,500,000	265,500,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
40	23 . 43	Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	100%	Tidak ada perubahan	324,100,000	324,100,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
41	23 . 44	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	100%	Tidak ada perubahan	265,500,000	265,500,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
42	23 . 45	Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	100%	Tidak ada perubahan	287,100,000	401,120,000	114,020,000	APBD	P-APBD
43	23 . 46	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Lintas Pematang Siantar - Simalungun	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kota Pematang Siantar- Kab. Simalungun	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	933,074,000	(66,926,000)	APBD	P-APBD
44	23 . 47	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Mandailing Natal	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Mandailing Natal	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	933,084,000	(66,916,000)	APBD	P-APBD
45	23 . 48	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Toba Samosir	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Toba Samosir	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	918,262,000	(81,738,000)	APBD	P-APBD
46	23 . 49	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Pakpak Bharat	Tertatnya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Pakpak Barat	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	926,191,000	(73,809,000)	APBD	P-APBD

47	23 . 50	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Padang Lawas	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Padang Lawas	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	1,163,630,000	163,630,000	APBD	P-APBD
48	23 . 51	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Gunung Sitoli	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kota Gunung Sitoli	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	972,099,000	(27,901,000)	APBD	P-APBD
49	23 . 52	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Tengah	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Tapanuli Tengah	Tidak ada perubahan	1 ha	Tidak ada perubahan	1,000,000,000	959,992,000	(40,008,000)	APBD	P-APBD
50		Perencanaan Pembangunan Rumah Pengungsi Gunung Sinabung	Tidak ada	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Kab. Karo	Tidak ada	1 Paket	Tidak ada	50,000,000	50,000,000	Tidak ada	P-APBD
51		Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Kab. Deli Serdang	Tidak ada	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Kota Medan	Tidak ada	35 Lokasi	Tidak ada	7,177,040,000	7,177,040,000	Tidak ada	P-APBD
52		Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Kab. Serdang Bedagai	Tidak ada	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Kab. Deli Serdang	Tidak ada	39 Lokasi	Tidak ada	7,974,540,000	7,974,540,000	Tidak ada	P-APBD
53		Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Kota Medan	Tidak ada	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Kab. Deli Serdang	Tidak ada	9 Lokasi	Tidak ada	1,843,740,000	1,843,740,000	Tidak ada	P-APBD
54		Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Kota Binjai	Tidak ada	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Kota Medan	Tidak ada	5 Lokasi	Tidak ada	1,030,040,000	1,030,040,000	Tidak ada	P-APBD
55		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kota Pematang Siantar	Tidak ada	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Kab. Deli Serdang	Tidak ada	8 Lokasi	Tidak ada	1,649,690,000	1,649,690,000	Tidak ada	P-APBD
56		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kab. Labuhan Batu	Tidak ada	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Kab. Labuhan Batu	Tidak ada	4 Lokasi	Tidak ada	828,490,000	828,490,000	Tidak ada	P-APBD
57		Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan MBR Kab. Labuhan Batu	Tidak ada	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Kab. Labuhan Batu	Tidak ada	5 Lokasi	Tidak ada	1,041,740,000	1,041,740,000	Tidak ada	P-APBD
58		Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan MBR Kota Tanjung Balai	Tidak ada	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Kab. Deli Serdang	Tidak ada	4 Lokasi	Tidak ada	832,940,000	832,940,000	Tidak ada	P-APBD
59		DED Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Kegiatan TA.2018	Tidak ada	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Sumut	Tidak ada	19 Lokasi	Tidak ada	1,103,620,000	1,103,620,000	Tidak ada	P-APBD
60		DED Pembangunan PSU Permukiman TA.2018	Tidak ada	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Sumut	Tidak ada	7 Lokasi	Tidak ada	454,840,000	454,840,000	Tidak ada	P-APBD

VIII	1.05.1.05.01.24.	Program pembinaan dan pengembangan perumahan dan permukiman	Publikasi pembangunan Sumatera Utara		Pameran, Perencanaan, Mayarakat, Aparatur		Sumatera Utara		1500 unit		22,963,786,000	23,649,791,000	686,005,000	APBD	P-APBD
1	24 . 01	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair Tahun 2017	Laporan partisipasi keikutsertaan dalam pameran/ Publikasi pembangunan sumatera utara	Tidak ada perubahan	Pameran	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 lap	Tidak ada perubahan	341,112,300	297,672,300	(43,440,000)	APBD	P-APBD
2	24 . 02	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta dan Pameran Lingkungan Hidup Sumatera Utara di Medan Tahun 2017	Laporan partisipasi keikutsertaan dalam pameran/ Publikasi pembangunan sumatera utara	Tidak ada perubahan	Pameran	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 lap	Tidak ada perubahan	325,480,000	283,615,000	(41,865,000)	APBD	P-APBD
3	24 . 03	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Inovasi Sumut 2017 dan Investment, Trade and Tourism of North Sumatera (ITT of North Sumatera) 2017	Laporan partisipasi keikutsertaan dalam pameran/ Publikasi pembangunan sumatera utara	Tidak ada perubahan	Pameran	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 lap	Tidak ada perubahan	170,750,000	163,010,000	(7,740,000)	APBD	P-APBD
4	24 . 04	Penyuluhan bagi Masyarakat dalam rangka pemanfaatan budaya tinggal di Rumah Susun di Provsu	Laporan penyuluhan/Pening katan rumah layak huni	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 lap	Tidak ada perubahan	257,200,000	262,200,000	5,000,000	APBD	P-APBD
5	24 . 05	Pilot proyek pembangunan infrastruktur permukiman perdesaan di Desa Binaan PKK Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan sarana dan prasaran lingkungan permukiman/Menin gkatkan kualitas lingkungan permukiman	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 pkt	Tidak ada perubahan	732,350,200	753,210,200	20,860,000	APBD	P-APBD
6	24 . 06	Workshop dan Sosialisasi Peringatan Hari habitat sedunia di provinsi sumatera utara	Pembangunan sarana dan prasaran lingkungan permukiman/Menin gkatkan kualitas lingkungan permukiman	Tidak ada perubahan	Pameran	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 pkt	Tidak ada perubahan	490,800,000	490,800,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
7	24 . 07	Koordinasi Pembangunan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman di Provsu	Laporan kinerja bidang perumahan dan permukiman/tersed ianya data kinerja dan capaian SPM Perumahan	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 lap	Tidak ada perubahan	229,085,000	229,085,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
8	24 . 08	Monitoring SPM Bidang Perumahan di Provsu	Tertatanya kawasan kumuh permukiman/Berku rangnya luas kawasan kumuh	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	100%	Tidak ada perubahan	131,685,000	131,685,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
9	24 . 10	Sosialisasi Perancangan Kebijakan Penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas Kab/Kota di Sumatera Utara	Laporan sosialisasi/Peningk atan rumah layak huni	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 lap	Tidak ada perubahan	192,750,000	192,750,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan

10	24 . 11	Realisasi Kesepakatan Penyediaan Kasiba dan Lisiba Litas Kab/Kota melalui penandatanganan MOU dan PKS antar Pemerintah Prov dan Kab/kota dan Unsur terkait bidang Perumahan	Perencanaan pembangunan perumahan/Peningkatan rumah layak huni	Tidak ada perubahan	Perencanaan	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 lap	Tidak ada perubahan	188,000,000	188,000,000	Tidak ada perubahan	APBD	Tidak ada perubahan
11	24 . 12	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni diluar kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	Rumah yang dibangun atau direhabilitasi/Peningkatan rumah layak huni	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	255 unit	Tidak ada perubahan	7,500,000,000	9,733,945,000	2,233,945,000	APBD	P-APBD
12	24 . 13	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka dukungan Hari Keluarga Nasional	Rumah yang dibangun atau direhabilitasi/Peningkatan rumah layak huni	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	34 unit	Tidak ada perubahan	989,200,000	1,015,200,000	26,000,000	APBD	P-APBD
13	24 . 15	Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan Kws.Permukiman (POKJA PKP)	Perencanaan pembangunan perumahan sumatera utara/Peningkatan rumah layak huni	Tidak ada perubahan	Aparatur	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 lap	Tidak ada perubahan	195,314,000	200,314,000	5,000,000	APBD	P-APBD
14	24 . 16	Penyediaan Informasi Perumahan dan Kws. Permukiman (Penyediaan Rumah MBR, KPR, sistem Pembiayaan, Perbankan, Asosiasi Pengembangan Perumahan, dll)	Bahan publikasi perumahan dan permukiman/Terse diannya bahan publikasi	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 set	Tidak ada perubahan	220,059,500	225,059,500	5,000,000	APBD	P-APBD
15	24 . 17	Identifikasi dan pemutakhiran data perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Utara	Buku laporan/Tersedianya data dan acuan pelayanan perumahan dan permukiman sumatera utara	Tidak ada perubahan	Perencanaan	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	1 buku	Tidak ada perubahan	500,000,000	497,450,000	(2,550,000)	APBD	P-APBD
16	24 . 18	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di Provsu	Profil kawasan permukiman/Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Perencanaan	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	3 kws	Tidak ada perubahan	1,500,000,000	1,493,126,000	(6,874,000)	APBD	P-APBD
17	24 . 19	Pembangunan Rumah Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung	Pembangunan rumah layak huni/Rumah relokasi pengungsi	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Kab. Karo	Tidak ada perubahan	48 unit	Tidak ada perubahan	3,000,000,000	97,920,000	(2,902,080,000)	APBD	P-APBD
18	24 . 20	Penyusunan Profil Kawasan Kumuh di PKW Provinsi	Profil kawasan kumuh permukiman/Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada perubahan	Perencanaan	Tidak ada perubahan	Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	5 kws	Tidak ada perubahan	2,500,000,000	2,451,619,000	(48,381,000)	APBD	P-APBD
19	24 . 21	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni di kepulauan nias Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan rumah layak huni/Terehabilitasi ya Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di Sumatera Utara	Tidak ada perubahan	Masyarakat	Tidak ada perubahan	Pulau Nias	Tidak ada perubahan	90 unit	Tidak ada perubahan	3,500,000,000	3,623,130,000	123,130,000	APBD	P-APBD
20	24.22	Sosialisasi dan Pemantapan Rumah Tidak Layak Huni (Pasca Pembangunan)	Tidak ada	Laporan sosialisasi/Peningkatan rumah layak huni	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Sumatera Utara	Tidak ada	1 lap	Tidak ada	200,000,000	200,000,000	Tidak ada	P-APBD
21		DED Rehabilitasi RTLH TA 2018		Pengurangan RTLH di Sumatera Utara	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Sumatera Utara	Tidak ada	10 Lokasi	Tidak ada	500,000,000	500,000,000	Tidak ada	P-APBD

22		Penyusunan DED Home Stay Di kawasan Danau Toba		Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Sumatera Utara	Tidak ada	0,05 ha	Tidak ada	70,000,000	70,000,000	Tidak ada	P-APBD
23		Penataan kawasan Kumuh dilokasi RTLH Sayur Matinggi (Tapsel)		Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Sumatera Utara	Tidak ada	0,2 ha	Tidak ada	200,000,000	200,000,000	Tidak ada	P-APBD
24		Penataan kawasan Kumuh dilokasi RTLH Deli Serdang		Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Sumatera Utara	Tidak ada	0,2 ha	Tidak ada	200,000,000	200,000,000	Tidak ada	P-APBD
25		Monitoring,Evaluasi, Koordinasi Kegiatan Bidang Rumah Swadaya		Tertatanya kawasan kumuh permukiman/berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Tidak ada	Masyarakat	Tidak ada	Sumatera Utara	Tidak ada	100%	Tidak ada	150,000,000	150,000,000	Tidak ada	P-APBD

MEDAN, 2017
KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. IDA MARIANA, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19601125 199203 2 001